



KR-Antara/Hendra Nurdiansyah

PEMBANGUNAN KELOK 18 JJLS: Foto udara pembangunan Jalan Kelok 18 di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), Kretek, Bantul, Rabu (7/8/2024). Jalan Kelok 18 di JJLS yang akan menghubungkan Kabupaten Bantul dan Gunungkidul merupakan proyek strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan biaya Rp 254 miliar tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2025.

BADAN GEOLOGI PETAKAN

11 Desa Rawan Bencana di Dieng

BANDUNG (KR) - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memetakan 11 desa yang masuk Kawasan Rawan Bencana (KRB) di Gunung Dieng, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

"Kami terus memperbaharui tentang pemetaan tiga KRB di Gunung Dieng dengan secara aktif melakukan sosialisasi oleh tim lapangan maupun tenaga ahli kepada masyarakat sekitar," kata Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Priatin Hadi Wijaya di Bandung, Rabu (7/8).

Dalam pemetaan KRB I, ada potensi desa dilanda aliran lahar serta berpotensi tertimpa hujan abu. Desa dengan radius 3 kilometer dari gunung api itu antara lain ada 3 desa yakni Desa Gembol, Pesurenan, dan Bujangsari.

Selanjutnya, KRB II diperuntukkan bagi 7 desa dengan radius 2 km yakni Desa Condong, Bakal, Sikunang, Sembungan, Kepakisan, Penaksiran Dua, dan Gerlang. Tujuh desa tersebut berpotensi terlanda gas beracun, semburan lumpur, hingga tertimpa lontaran batu pijar dan hujan abu

lebat. Sedangkan untuk KRB III sangat berpotensi terancam gas beracun dengan berada di radius 1 km yang meliputi satu desa yakni Desa Sumberbarejo.

Lebih lanjut, Hadi menjelaskan, pemetaan Kawasan Rawan Bencana tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Dieng terutama soal aliran gas beracun (CO2) yang berada di wilayah ini.

Dijelaskan, gas beracun ini terjadi karena erupsi freatik dari sejumlah kawah di kawasan Dieng yang memiliki konsentrasi gas tinggi yang berbahaya bagi kehidupan manusia.

Hadi juga menyebutkan, Gunung Dieng pada 1979 pernah memunculkan gas beracun di Kawah Sinila yang menewaskan 149 orang. "Kami selalu melakukan sosialisasi termasuk adanya peringatan terkait dengan peningkatan aktivitas suhu dan kandungan CO2 yang berbahaya dan alhamdulillah dalam beberapa tahun terakhir tidak ada korban jiwa masyarakat Dieng ini yang menghirup gas beracun," katanya. (Ant/San)-f

DIANGGAP TAK BERI KEADILAN BAGI PESERTA PEMILU

Ambang Batas Pencalonan Presiden Digugat ke MK

JAKARTA (KR) - Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu perihal ambang batas pencalonan presiden digugat oleh Direktur Eksekutif Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT) Hadar Nafis Gumay dan pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Konstitusionalitas pasal tersebut diuji karena dianggap tidak memberikan keadilan bagi partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di parlemen.

Menurut mereka, ambang batas pencalonan presiden dalam pasal digugat juga tidak berkaitan dengan prinsip efisiensi pemilihan presiden. "Para pemohon memberikan alternatif pilihan mengenai pengaturan ambang batas pencalonan presiden yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan kepada Mahkamah dalam memutus perkara dimaksud," kata salah satu kuasa hukum para pemohon, Sandy Yudha Pratama Hulu pada sidang pemeriksaan pendahuluan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Rabu (7/8).

Para pemohon memberikan alternatif pengaturan ambang batas pencalonan presiden yang

tidak lagi didasarkan pada perhitungan matematis jumlah kursi maupun suara yang didapat oleh partai politik pada pemilu sebelumnya. Dalam hal ini, mereka mengajukan dua model pengaturan ambang batas pencalonan presiden.

Pertama, partai politik yang memiliki kursi di DPR diberikan hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa dikenakan ambang batas pencalonan. "Artinya, setiap partai politik yang berhasil melewati ambang batas parlemen dalam pemilu sebelumnya berhak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden," ujar Sandy.

Kedua, partai politik nonparlemen dan partai politik yang baru menjadi peserta pemilu dikenakan ambang batas pencalonan presiden sekurang-kurangnya 20 persen dari jumlah partai politik peserta pemilu. "Hal ini berarti ambang batas pencalonan presiden yang diberlakukan bagi partai politik nonparlemen maupun partai politik yang baru mengikuti pemilu berjalan bukanlah hasil dari pemilu sebelumnya," jelas Sandy.

Partai politik nonparlemen maupun yang baru mengikuti pemilu dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan cara menggabungkan diri pada suatu kelompok partai pengusul yang berjumlah sekurang-kurangnya 20 persen dari jumlah partai politik peserta pemilu yang sedang berjalan. Penetapan ambang batas 20 persen bagi partai politik nonparlemen dan partai politik yang baru mengikuti pemilu diambil dari norma yang ada saat ini (existing norm) yang telah digunakan sejak Pemilihan Umum Presiden 2009. (Ant/Has)-f

CEGAH TANNUR KE LUAR NEGERI Kejaksanaan-Imigrasi Koordinasi

JAKARTA (KR) - Kejaksanaan Agung menegaskan, pencegahan Gregorius Ronald Tannur ke luar negeri yang telah diajukan Kejaksanaan, saat ini sedang dikoordinasikan dengan Ditjen Imigrasi Kementanham. Koordinasi dilakukan lantaran status Ronald yang telah dinyatakan bebas dari dakwaan kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti.

"Jajaran Kejaksanaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksanaan Negeri Surabaya telah melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi. Karena ada kekhawatiran bahwa yang bersangkutan berpergian ke luar negeri, maka dilakukan upaya-upaya terkait itu. Oleh karenanya, beberapa waktu yang lalu dari Kejaksanaan Tinggi Jawa Timur sudah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk mencari solusi terhadap kondisi ini," kata Kapuspenkum Kejaksanaan Agung Harli Siregar di Jakarta, Selasa (6/8) malam.

Sementara terkait upaya kasasi terhadap putusan bebas Ronald, Harli mengatakan saat ini jaksa penuntut umum Kejaksanaan Negeri Surabaya sedang mempersiapkan memori kasasi dengan asistensi dari Kejaksanaan Tinggi Jawa Timur. "Tim ini akan terus melakukan inventarisasi terhadap fakta persidangan dari berkas perkara dan menganalisa salinan putusan," ucapnya. (Ant/Has)-f

UPAYA NYATA MENYELAMATKAN LAHAN KRITIS AKIBAT ABRASI

BRI Salurkan Ribuan Bibit Mangrove Kelompok Tani di Muaragembong



KR - Istimewa

BRI turut berkontribusi melestarikan lingkungan hidup dan untuk memulihkan ekosistem di wilayah Muaragembong, melalui program BRI Menanam - Grow & Green Penanaman.

JAKARTA (KR) - Hampir dua dekade lalu, Muaragembong, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dipenuhi dengan tanaman Mangrove. Namun seiring berjalannya waktu, Muaragembong mengalami abrasi. Pohon mangrove yang seharusnya jadi 'sabuk' perlahan longgar dan kehilangan fungsinya.

Kecamatan Muaragembong memiliki enam desa, dimana dua di antaranya, yaitu Desa Pantai Bahagia dan Desa Pantai Bakti merupakan wilayah dimana lahannya hampir tergerus abrasi. Endang selaku Bendahara Kelompok Tani Sumber Makmur bercerita, lahan di kedua desa tersebut mulai tergerus abrasi sejak 2005 hingga kemudian mulai rusak parah sekitar tahun 2010.

"Permukaan air laut mulai meninggi, green belt dari mangrove di pesisir berkurang yang bikin air laut masuk karena nggak ada penahannya. Dulu, lahan di desa adalah tambak produktif, bisa tanam udang, bandeng, dan lainnya. Sekarang karena terkena abrasi, permukaan air meninggi, pohon berkurang, maka jadi seperti lautan kecil," ujar Endang saat dihubungi, Selasa (23/7).

Ekosistem mangrove yang seharusnya kaya dengan fungsi dan manfaatnya, yaitu sebagai green belt atau penghalang dari gempuran pancaran gelombang

air laut di Muaragembong pun menjadi rusak. Terdapatnya ancaman kerusakan lingkungan dan berkurangnya jumlah sumber daya alam yang makin melebar, tentu membuat masyarakat di Kampung Solokan Kendal, Desa Pantai Bahagia, Muaragembong khawatir.

"Datarannya sudah hampir tergerus abrasi. Ada sekitar 2500 hektar dari dua desa, di Desa Pantai Bahagia dan Desa Pantai Bakti yang tergerus abrasi

karena faktor iklim dan tempat tidak dikelola masyarakat secara maksimal," cerita Endang.

Menurut Endang, tempat tinggalnya sejak lahir itu perlu mendapat perhatian khusus. Kemudian pada tahun 2021-2023, masyarakat Kampung Solokan Kendal mendapat bantuan dari BRI lewat Program BRI Menanam - Grow & Green Penanaman 10.000 bibit mangrove dan mereka mengambil langkah inisiatif untuk menjaga lingku-

ngan, dengan membentuk Kelompok Tani Sumber Makmur yang beranggotakan 24 orang.

"Aktivitas kami sehari-hari adalah petani tambak. Sekarang posisinya tambak yang dikelola terancam abrasi karena gelombang pasang rob. Lalu dari BRI ada ngasih bantuan 10 ribu bibit mangrove untuk ditanam di pinggir tambak dan daerah pesisir, supaya tambak kami aman. Mangrove yang ditanam itu jadi green belt untuk mencegah abrasi," kata Endang.

Upaya Nyata BRI Lawan Perubahan Iklim

Berkontribusi melestarikan lingkungan hidup, menjadi salah satu fokus BRI untuk memulihkan ekosistem di wilayah Muaragembong. Melalui Program BRI Menanam - Grow & Green Penanaman, bantuan bibit mangrove tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif bagi lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon atau menyerap polusi udara, termasuk menciptakan keanekaragaman hayati yang menjadi habitat hewan kecil di sekitar Muaragembong.

Endang bercerita kalau anggota kelompoknya melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pendataan kondisi perkembangan tanaman. Mereka juga mengukur potensi cadangan dan serapan karbon yang berjalan dari 2023-2026.

"Kami melakukan pengukuran seperti ketinggian pohon,

diameter batang untuk mangrove yang sudah ditanam, termasuk penyulaman kalau ada yang mati disulam untuk menjaga 10 ribu mangrove yang sudah ditanam. Lalu hal itu kami laporkan ke BRI per empat bulan sekali. Semua ada laporannya," kata Endang yang juga menjelaskan kalau data monitoring itu akan menentukan kelulusan hidup bibit mangrove.

Soal kelulusan hidup bibit mangrove, Endang mengatakan rata-rata angka kehidupan bibit mangrove dari BRI yang berhasil tumbuh sekitar 85-90%. Sisanya, kata dia, gagal hidup alias mati karena faktor cuaca dan hama ulat.

"Ada juga karena faktor rob karena memang batang belum besar, sehingga akarnya belum kuat, kena ombak dan bisa cepat lepas," katanya.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto, mengatakan BRI secara konsisten terus mendukung pelestarian alam dalam menjaga pesisir pantai dari abrasi serta mengembalikan habitat hutan mangrove yang ada di Tanah Air. Hal itu juga menjadi salah satu bentuk komitmen BRI untuk mendukung upaya Pemerintah agar bebas emisi karbon pada tahun 2060.

"Kami berharap kegiatan penanaman mangrove yang telah dilakukan memberikan manfaat bagi keberlanjutan dan

hidup masyarakat. Selain itu, proses pelestarian tidak dilakukan hanya sebatas awal fase penanaman semata, tetapi juga dilanjutkan dengan perawatan demi hasil yang maksimal, kami menitipkan kepada masyarakat untuk dapat menjaga dan melestarikannya," ujar Catur.

Catur menambahkan, selain penyaluran bantuan bibit Mangrove, upaya nyata BRI dalam melawan perubahan iklim dalam program BRI Menanam Grow & Green juga dilakukan dengan penanaman pohon di lahan-lahan kritis dan kegiatan transplantasi terumbu karang.

"BRI Menanam Grow & Green merupakan wadah untuk mewujudkan praktik pembangunan berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk melestarikan lingkungan, menyerap karbon, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian," tegas Catur.

Sejak Tahun 2023, program BRI Menanam - Grow & Green telah berhasil menanam bibit pohon sebanyak 42.800 bibit. Bibit pohon yang ditanam diantaranya mangrove, cemara laut, dan tanaman produktif (durian, kopi, aren, pinus, pala, dsb) serta men-transplantasi 2.430 fragmen terumbu karang di beberapa Pulau Indonesia. Secara keseluruhan, program ini berpotensi menyerap karbon sebesar 9.653,51 Ton CO2e/tahun. (*)



BRI Salurkan Ribuan Bibit Mangrove Kelompok Tani di Muaragembong



Kegiatan penanaman mangrove

KR - Istimewa